BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Akibat hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Perkara Putusan Nomor 2/G/2022/PTUN Padang

Sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pejabat yang tidak melaksanakan putusan dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif.
- b. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor SP.01.01/1011-13.71.200/IX/2021, tanggal 21 September 2021, perihal Pemberitahuan Pengembalian Berkas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor SP.01.01/1011-13.71/IX/2021, tanggal 21 September 2021, perihal Pemberitahuan Pengembalian Berkas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 369.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor 2/G/2022/PTUN Padang

- a. Kantor Pertanahan Kota Padang tidak memberikan bukti yang cukup mengenai adanya tumpang tindih tanah.

- b. Tidak terdapat alat bukti mengenai penguasaan fisik dan prosedur penerbitan sertifikat tanah yang dinyatakan tumpang tindih.
- c. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Keputusan administratif terkait pertanahan harus didasarkan pada data dan verifikasi yang jelas agar memiliki kepastian hukum.

B. Saran

- a. Agar Pejabat Tata Usaha Negara meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dalam mengeluarkan keputusan administratif.
- b. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan PTUN